

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia termasuk negara yang masih belum bisa dikatakan baik dan maju dalam bidang pendidikan. Terbukti dengan angka putus sekolah dan tingkatan pendidikan yang masih rendah, kesenjangan sosial yang tinggi, rendahnya daya saing Indonesia dalam pendidikan menjadi tolak ukur masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini berdampak pada persoalan sumber daya manusia (SDM). Meskipun demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami peningkatan mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,94), Selama 2010–2021, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76 persen. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 13,08 tahun, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06 tahun, dari 8,48 tahun menjadi 8,54 tahun pada tahun 2021. Dari data tersebut, sumber daya manusia Indonesia mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan (BPS, 2021)

Program dan evaluasi secara berkala terus dilakukan, namun langkah dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia terkesan lambat sehingga tertinggal jauh, dan tidak dapat dipungkiri masih masuknya pengaruh radikalisme ke dalam dunia pendidikan. Pendidikan sebagai wadah manusia dalam mengalami pengalaman langsung dalam kehidupan di segala lingkungan, dan kunci sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan, proses menjadikan manusia menjadi manusia yang

memiliki pengetahuan, kemampuan, kekuatan dan ketahanan malangan, kebenaran, kejujuran, dan menjadi manusia yang berhati baik, berilmu, berakhlak, dan memiliki keimanan, dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi, idealisme tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Kekerasan masih terjadi pada lembaga pendidikan, dengan kata lain istilah radikalisme ada dalam lembaga pendidikan. (Redja, 2014, Soedijarto, 2008, Mulyasa, 2011, Saekan, 2016).

Pendidikan yang masih ada unsur pengaruh dari radikalisme bisa sangat berbahaya yang dapat berpengaruh pada mutu pendidikan. Radikalisme dapat dengan mudah berpengaruh terhadap siapapun, kapan dan dimana saja. Karenanya, harus ada perencanaan dan penanganan khusus dalam menghadapi bahaya radikalisme oleh semua pihak yang bersangkutan. Karenanya, sekolah-sekolah harus berupaya dan kerja keras dalam menghadapi pengaruh radikalisme. Jika tidak ada upaya yang serius, lembaga pendidikan dapat menjadi sumber penyebaran dan pengaruh radikalisme, tidak kebal terhadap pengaruh ideologi radikal, yang seharusnya lembaga pendidikan menjadi lembaga yang tepat dalam menanggulangi dan menghilangkan radikalisme. (Saekan, 2016, Saihu dan Marsiti, 2019, Rohkmad, 2012, Asrori, 2015).

Radikalisme merupakan cara berpikir dan bersikap yang biasanya tidak menghormati pendapat atau pemikiran orang lain, sikap fanatik, sikap eksklusif, dan sikap revolusioner. Tetapi, pemikiran radikalisme tidak selalu diwujudkan dalam kekerasan, ada juga radikalisme positif, namun kebanyakan radikalisme yang pernah terjadi selalu dalam bentuk tindakan kekerasan dan anarkis untuk dapat mencapai tujuannya, seperti bom bunuh diri, penculikan, penyanderaan, dan perampokan, pembajakan pesawat, kudeta berdarah, demonstrasi dan pemboikotan yang anarkis,

tawuran antar kelompok baik dikalangan pelajar ataupun kelompok masyarakat, dan tindakan rasisme. (Dede, 2016, Leni, 2014, Zainal, 2014).

Radikalisme sudah banyak mempengaruhi para mahasiswa dan siswa, dimana pada masa tersebut masih mencari identitas diri, serta masih memiliki pemikiran yang belum stabil, sehingga dengan mudahnya terpengaruh oleh radikalisme. Survei yang dilakukan oleh KPAI pada 2010 hingga 2011 pada 59 sekolah swasta dan 41 sekolah negeri di 10 wilayah se-Jabodetabek, dengan sampel 993 siswa SMP dan siswa SMA. Hasil survei menunjukkan hampir 50% dari pelajar setuju tindakan kekerasan atau aksi radikal demi agama, 14,2% siswa menyatakan setuju dengan aksi terorisme yang dilakukan oleh Imam Samudra, Amrozi, dan Noordin M Top. 84,8% siswa juga menyatakan setuju dengan penegakan syariat Islam. Sementara itu, sebanyak 25,8% menganggap bahwa Pancasila sudah tidak relevan lagi sebagai ideologi negara, ada 229 kasus tawuran pelajar sepanjang Januari hingga Oktober 2013, jumlah ini meningkat 44 % dari tahun 2012 dan sebanyak 19 siswa meninggal dunia. Tawuran tidak hanya sering terjadi dikalangan pelajar, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Hal ini terjadi karena pengaruh radikalisme dengan mudahnya menyebar melalui media internet yang sudah menjadi salah satu kebutuhan para mahasiswa dan pelajar, sebagai dampak negative dari kebijakan global, kemajuan dengan pesat di bidang teknologi dan informasi. (2014 Fanani, 2013, Hasibuan, 2018, Hendarman, 2019, Leni, 2014).

Pendidikan karakter memiliki peranan penting dalam pendidikan mulai dari guru, peserta didik, dan masyarakat supaya menjadi yang berakhlak mulia, sebagai benteng dalam menghadapi era globalisasi, dan dapat terhindar dari pengaruh negative pemikiran dan ideologi yang menyimpang, khususnya radikalisme. Dalam lingkungan nasional, terdapat sejumlah peraturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan

pendidikan karakter. Peraturan-peraturan tersebut tersusun secara hierarkis, baik dalam bentuk Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri. Sejauh ini terdapat 3 (tiga) peraturan yang terkait dengan karakter dalam bidang pendidikan, yaitu: 1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal, 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah. Undang-undang tersebut menjadi landasan bahwa pendidikan karakter menjadi program prioritas yang wajib dilaksanakan dalam tingkat satuan pendidikan. Melalui implementasi pendidikan karakter yang harus diterapkan di semua lembaga pendidikan, dapat terjadi pembiasaan penanaman nilai-nilai karakter sehingga dapat mewujudkan karakter berketuhan, peduli diri sendiri dan lingkungan, berakhlak mulia, cinta tanah air, yang kesemuanya terjadi atas dasar pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan. (Pemerintah Republik Indonesia, 2010, Samami, 2011, Citra, 2012).

Dalam Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) terdapat lima karakter utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Hal ini mempertegas bahwa pendidikan karakter berfungsi sebagai pencapaian visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah diterbitkan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 pada setiap jenjang pendidikan. (Komalasari & Saripudin, 2017, Samami 2017).

Kesuksesan dalam pelaksanaan pendidikan karakter dapat terlaksana dengan sinergitas yang baik antara kepala sekolah, guru, siswa, seluruh warga sekolah, stakeholder, dan masyarakat sekitar. Kepala sekolah memiliki peranan dalam

mengkoordinasikan dan menyelaraskan semua sumber daya pendidikan. Pengelolaan pendidikan karakter di sekolah, hendaknya diterapkan berdasarkan nilai-nilai karakter, yaitu; 1) tanggungjawab, 2) profesionalisme, 3) kesatuan arah kebijakan, 4) tertatur, 5) disiplin, 6) seimbang, 7) inisiatif, 8) semangat 9) kerjasama, 10) dan ihklas. Dalam pengelolaan pendidikan karakter harus ada perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. (Mulyasa, 2016, Gunawan, 2017, Harun, 2017).

Tujuan pendidikan nasional pada pasal 3 UU Sisdiknas No.20 2003, adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa yang berkarakter baik, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun, meskipun sudah hampir kurun waktu ditetapkan penerapan pendidikan karakter di sekolah, semakin luas mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia, dan ketimpangan yang masih dirasakan dari hasil pendidikan, ini dapat dilihat dari siswa yang masih aktif sekolah, banyak yang belum terlepas dari pengaruh seks bebas pada kalangan pelajar, narkoba, tawuran, rasisme, tindakan kekerasan senior-junior, dan sebagainya. Untuk mengatasi dan menanggulangi tindakan-tindakan tersebut, harus saling bersinergi dalam melaksanakan pendidikan karakter dengan baik di kalangan para pelajar SMA/SMK khususnya. (Helmawati, 2017, Kesuma, dkk, 2013, Samami, 2017, Gunawan, 2017). Implementasi pendidikan karakter harus berdasarkan perencanaan strategis sekolah dan pengembangan visi dan misi sekolah, harus menyusun kinerja lembaga sekolah sehingga perencanaan tahunan (*annual planning*) yang lebih terpadu dan terarah. Kepala sekolah dan guru berperan sebagai pemimpin yang dapat mempengaruhi siswa agar dengan mudah dilakukan pembinaan dan pembiasaan nilai-nilai karakter yang baik, dan belajar pengetahuan dan keterampilan yang disampaikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. (Arifin & Rusdiana, 2019, Wirawan, 2013).

Kementerian Pendidikan Indonesia mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Profil Pelajar Pancasila merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia yang mana mengedepankan pada pembentukan karakter. Pada era kemajuan teknologi globalisasi saat ini, peran pendidikan nilai dan karakter sangat dibutuhkan demi memberikan keseimbangan antara perkembangan teknologi dan perkembangan manusianya. Paradigma Pendidikan Baru menikmati pencapaian profil siswa Pancasila dalam kerangka pendidikan dan kompetensi sepanjang hayat melalui enam karakteristik utama yang merupakan karakteristik utama: kepercayaan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, keragaman global, gotong royong, kemandirian, berpikir kritis dan kreativitas. (Kemendikbud, 2021, Nugraheni, dkk, 2022, Iis Nurasih, 2022).

Beberapa catatan dari temuan penelitian awal yang dilakukan di beberapa sekolah SMAN yang ada di Jakarta, sekolah ini mampu menghilangkan budaya tawuran, dan implementasi pendidikan karakter berjalan dengan baik, dan terus melakukan

pengembangan. Tetapi, masih banyak SMAS dan SMKS, yang belum optimal dan efektif dalam implementasi pendidikan karakter, sehingga dimana tawuran masih terjadi, narkoba dan seks bebas masih merajalela, sehingga merendahkan mutu lulusan yang harusnya lulusan di SMKS siap kerja, namun menjadi pengangguran, dan lulusan SMA yang seharusnya berorientasi ke pendidikan tinggi, banyak yang tidak melanjutkan.

Oleh karena itu, beberapa persoalan yang masih dihadapi oleh SMA terhadap implementasi pendidikan karakter antara lain:

1. Sekolah belum memiliki program khusus dalam penanganan dan penanggulangan radikalisme, dan masih rendahnya kesadaran warga sekolah terhadap bahaya radikalisme
2. Belum adanya peran yang signifikan dari kepemimpinan terhadap pelaksanaan pendidikan karakter sebagai upaya penanggulangan dan penanganan radikalisme
3. Belum jelasnya pelaksanaan pendidikan karakter pada kebijakan pendidikan dalam penanggulangan dan penanganan radikalisme
4. Belum jelasnya pelaksanaan pendidikan karakter pada manajemen pendidikan dalam penanggulangan dan penanganan radikalisme
5. Belum ada komponen-komponen, gambaran factual dan perilaku kepemimpinan berbasis karakter dalam pelaksanaan pendidikan karakter sebagai upaya penanggulangan radikalisme

Penelitian awal yang penulis lakukan di SMAN 70 Jakarta yang mampu menghilangkan budaya tawuran, dan mampu mengimplementasikan pendidikan karakter dengan baik, dan SMAN 58 yang mampu menyelesaikan kasus intoleransi

pada tahun 2020 yang pernah terjadi di sekolah tersebut. Fokus penelitian dilakukan di level SMA dalam pendidikan karakter, karena akan dapat diharapkan, para siswa sekolah menengah atas tidak melakukan tawuran lagi dan dapat dihilangkan budaya tawuran tersebut, dan mampu mengimplementasikan pendidikan karakter dengan baik dan prosedural. Dalam hal ini, tidak hanya manajemen yang bagus dalam implementasi pendidikan karakter, tetapi juga dari kapasitas kepala sekolah yang diwajibkan turut serta, dan kepala sekolah yang memiliki jiwa kepemimpinan berbasis karakter. Dari latar belakang tersebut, maka penelitian diadakan di SMA DKI Jakarta. Hal ini pun dalam implementasi pendidikan karakter, tidak dapat terlepas dari ciri khas DKI Jakarta sebagai masyarakat urban dan kota besarnya khususnya masyarakat Betawi.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengetahui, memahami, menelusuri, mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan dari hasil temuan yang akan diperoleh oleh peneliti dari penelitian di lapangan, bagaimana fenomena pengaruh radikalisme pada kalangan pelajar, terutama sekolah-sekolah yang secara umum sudah banyak diketahui oleh masyarakat, sekolah yang pernah dan sudah terpengaruh oleh radikalisme di SMAN 58 dan SMAN 70. Dari penelitian ini mengarah pada kepemimpinan setiap orang mulai dari kepala sekolah, guru, dan siswa, dalam menghadapi radikalisme. Kepemimpinan adalah faktor yang paling penting pada setiap individu dalam menghadapi radikalisme, yang diharapkan jika seseorang berjiwa kepemimpinan yang baik, bagus, dan Amanah, maka setidaknya dapat meminimalisir masuknya pengaruh radikalisme. Apabila seseorang memiliki jiwa kepemimpinan yang rapuh, buruk, bahkan sudah hilang jiwa kepemimpinan tersebut, maka pengaruh radikalisme akan dengan mudah berpengaruh pada individu tersebut. Inilah yang akan menjadi sasaran penelitian, yang diharapkan akan menjadi

kebaharuan tentang ilmu kepemimpinan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana upaya SMA Negeri 58 dan SMA Negeri 70 dalam menanggulangi radikalisme?
2. Bagaimana kepemimpinan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Negeri 58 dan SMA negeri 70?
3. Bagaimana pelaksanaan program pendidikan karakter di SMA Negeri 58 dan SMA Negeri 70?
4. Bagaimana manajemen pendidikan karakter di SMA Negeri 58 dan SMA Negeri 70?
5. Bagaimana komponen-komponen kepemimpinan Berbasis Karakter di SMA Negeri 58 dan SMA Negeri 70?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mengkajian dan menganalisis temuan untuk mendapatkan model hipotesis Kepemimpinan Berbasis Karakter sebagai model yang paling efektif dan tepat untuk diterapkan di tingkat SMA sebagai implementasi pendidikan karakter dengan harapan mampu menanggulangi radikalisme di kalangan pelajar SMA tersebut. Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam kajian ilmu administrasi pendidikan dan belum ada gambaran jelas seperti apa dan bagaimana seorang kepemimpinan yang berkarakter, seperti yang diharapkan dalam implementasi pendidikan karakter, untuk memperoleh gambaran dan ukuran yang jelas mengenai kepemimpinan berbasis karakter. Beberapa tujuan penelitian ini

adalah:

1. Melakukan kajian dan analisis dalam implementasi pendidikan karakter sebagai upaya penanggulangan terhadap radikalisme di SMAN 58 dan SMAN 70.
2. Melakukan kajian dan analisis pada program, kepemimpinan dan manajemen Kepemimpinan pada implementasi pendidikan karakter sebagai upaya penanggulangan terhadap radikalisme di SMAN 58 dan SMAN 70.
3. Melakukan kajian dan analisis untuk mendapatkan komponen-komponen dan perilaku kepemimpinan Berbasis Karakter, sehingga didapatkan model kepemimpinan berbasis karakter pada implementasi pendidikan karakter sebagai upaya penanggulangan terhadap radikalisme di SMAN 58 dan SMAN 70.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan nilai manfaat antara lain:

- a. Memperkaya tentang ilmu administrasi pendidikan khususnya tentang kapasitas kepemimpinan dalam implementasi pendidikan karakter, dalam hal ini adalah pengelolaannya yang baik
- b. Terumuskannya sebuah program yang merupakan integrasi dalam pengelolaan sebagai salah satu pengembangan pendidikan karakter
- c. Terumuskannya model kepemimpinan berbasis karakter yang memiliki nilai-nilai karakter yang mampu menanggulangi radikalisme

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bentuk kepentingan praktis bagi pelaksanaan pendidikan karakter
- b. Menjadi referensi dalam kepemimpinan dan pengembangan pendidikan

karakter

- c. Memberikan gambaran tentang kepemimpinan berbasis karakter yang memiliki nilai-nilai karakter yang mampu menanggulangi radikalisme

E. Struktur Organisasi Penelitian

Urutan penulisan disertasi ini terdiri dari seluruh bab dan bagian bab, yakni:

1. BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini Bagian ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan struktur organisasi penelitian.

2. BAB II : Kajian Pustaka dan Kerangka Berpikir

Bab ini berisi uraian tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran penelitian, sebagai landasan teoritik dalam penelitian ini, yang terdiri dari: teori dan konsep radikalisme, pendidikan karakter, model-model kepemimpinan, program dan manajemen pendidikan karakter.

3. BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, tempat penelitian, desain penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan keabsahan data penelitian, dan pengolahan data temuan penelitian dengan Software QSR NVIVO

12

4. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, temuan komponen-komponen Model Kepemimpinan Berbasis Karakter

5. BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab terdiri dari simpulan, implikasi, dan rekomendasi.